

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan koperasi terdapat pada tujuan pembangunan di Indonesia. Tujuan pembangunan di Indonesia adalah membangun manusia yang seutuhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang makmur dan berkeadilan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia terdapat tiga jenis badan usaha yaitu perusahaan swasta, negara dan koperasi. Koperasi berbeda dengan badan usaha lain yang tujuan utamanya mencari laba sedangkan koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi di Indonesia merupakan salah satu sokoguru perekonomian Indonesia atau sebagai badan usaha yang mampu tumbuh untuk membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat menengah keatas dan menengah kebawah. Koperasi harus memiliki jaringan usaha dan daya saing yang kuat agar dapat mengantisipasi peluang dan tantangan yang ada di masa akan datang. Koperasi juga harus terarah untuk dapat melestarikan identitas dan mempertahankan jati dirinya.

Jati diri koperasi dapat terlihat dari pandangan pengurus, pengawas, dan anggota dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terjadi

penyimpangan penanaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi didalam jiwa dan sikap setiap pengurus, pengawas maupun anggota maka perlu mendapatkan perhatian khusus dalam melakukan pengembangan kegiatan koperasi yang sesuai dengan jati dirinya.

Pada saat ini, banyak pihak-pihak yang memberikan pendapat dan penilaian bahwa koperasi belum berhasil menunjukkan ciri keunggulannya sebagai lembaga ekonomi milik rakyat yang berbeda dengan badan usaha lain, hal ini dapat terlihat dari belum efektifnya kemampuan koperasi untuk berkembang dan berprestasi melebihi badan usaha lainnya, sehingga kinerja koperasi secara umum dirasakan belum menggembirakan terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anggotanya,¹ Hal ini dapat dilihat pada akhir tahun 2011 jumlah koperasi berkualitas di Indonesia mencapai 54.643 unit atau 77,30 persen dari 70.000 koperasi, padahal pemerintah menargetkan koperasi yang kurang aktif hanya tersisa lima persen pada tahun 2014.²

Kinerja koperasi merupakan akumulasi kinerja semua individu yang bekerja didalamnya, maka upaya peningkatan kinerja koperasi harus ditingkatkan oleh masing-masing individu yang terkait didalam kegiatannya. Oleh karena itu pihak yang mengelola perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi agar pencapaian tujuan koperasi akan mudah tercapai.

Bagi pengurus koperasi, peningkatan kinerja merupakan dilema tersendiri . Disatu sisi peningkatan kinerja merupakan faktor yang perlu diperhatikan dan

¹ Muslim Nasution, "Kinerja Koperasi", (Jakarta: bank bukopin dan TPP-KUMKM, 2002) p. 2

²<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/11/09/25/ls23cb-hanya-75-persen-koperasi-yang-aktif> (diakses tanggal 27 Maret 2012)

harus di tingkatkan, akan tetapi disisi lain keterbatasan sumber daya mengakibatkan koperasi tidak dapat langsung merealisasikan peningkatan kinerja tersebut, padahal suatu koperasi yang tidak disertai dengan sumber daya manusia yang baik seperti pengurus, pengawas maupun anggota akan menghambat pelaksanaan kegiatan koperasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kegiatan koperasi secara profesional sangat dibutuhkan untuk mendukung anggota berperan aktif dalam berkoperasi, karena makin baik pengelola koperasi dalam melayani anggota maka baik pula dukungan atau peran anggotanya. Pada kenyataannya masih banyak sumber daya manusia dikoperasi yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan sehingga dalam mengelola potensi koperasi belum efektif dan efisien. Selama periode 2009 terdapat 32.168 jumlah manajer di koperasi, namun pada tahun 2010 jumlah manajer koperasi menurun sebanyak 118 menjadi 32.050.³ Hal ini dipercaya sebagai dampak dari kurang dipandanginya nilai koperasi sebagai badan usaha, mulai dari gaji atau insentif yang diberikan maupun fasilitas tempat kerja.

Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia yang ada dikoperasi dapat dicapai dengan memberikan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan pengelola koperasi yang sesuai kebutuhan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki koperasi sehingga akan meningkatkan kinerja koperasi.⁴ Meningkatnya kegiatan pendidikan pengurus koperasi maka akan meningkatkan kinerja koperasi,

³ Kementerian Koperasi Dan UMKM, *Analisis Kinerja Koperasi Tahun 2006-2010*

⁴ Muslim Nasution, *op.cit*, p.63

dan sebaliknya bila pengelola koperasi memiliki pendidikan yang rendah maka akan rendah pula kinerjanya.

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di koperasi dapat di terapkan melalui program yang diberikan dari koperasi itu sendiri ataupun program pemerintah untuk meningkatkan kinerja koperasi. Namun sayangnya banyak pengurus koperasi yang belum mengerti dan mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah sehingga untuk meperbaikinya harus mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia koperasi. Menyelenggarakan program yang akan dilakukan koperasi tidaklah mudah karena diperlukan dana yang cukup besar untuk menunjang kegiatan tersebut sehingga banyak koperasi yang hanya menunggu program dari instansi-instansi pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan. Pemerintah harus selalu dituntut untuk mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar dan berdasarkan semangat kebersamaan, kegotong-royongan dan kekeluargaan.⁵ Melihat kenyataan ini maka banyak pihak yang perlu dituntut untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kinerjanya.

Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kinerjanya, salah satunya adalah bentuk pembinaan , yang di tanda tangani oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan tenaga-tenaga konsultan manajemen

⁵*Ibid*, p.60

bagi koperasi seperti tergambar dalam petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan koperasi dan pengusaha kecil. Bentuk pembinaan yang lain adalah dengan menyediakan tenaga-tenaga konsultan manajemen bagi koperasi seperti tergambar dalam petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan koperasi dan pengusaha kecil.

Menciptakan sumber daya manusia koperasi yang profesional cukup sulit, karena pengelolaan koperasi membutuhkan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Semuanya itu dapat tercapai apabila koperasi sebagai badan usaha melaksanakan kegiatan usahanya menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan koperasi merupakan hal yang sangat penting, karena baik tidaknya pengelolaan koperasi untuk mengembangkan usahanya merupakan tolok ukur kinerja koperasi.

Mengembangkan usaha koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi dapat dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.. Koperasi dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain seperti sesama koperasi, perusahaan, lembaga keuangan dan lain-lain. Kemitraan didalam koperasi harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, profesional, dan tanggung jawab agar kemitraan yang dijalankan koperasi dapat saling menguntungkan.

Kemitraan didalam koperasi dapat menjadi sarana untuk koperasi menambah anggota maupun sarana untuk memperluas pasar agar koperasi memasarkan barang-barang yang dihasilkannya sehingga koperasi bisa tumbuh menjadi koperasi sehat dan mampu bersaing di pasar global.

Kemitraan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dinilai masih bersifat temporer sebagian perusahaan yang bermitra dengan koperasi dalam melaksanakan belum sepenuhnya dalam bentuk program, terstruktur, terencana, dan sistemis serta kurang melembaga.⁶ Pihak pemerintah seharusnya dapat membina dan mendorong koperasi agar terlaksananya kemitraan usaha.

Pengurus, pengawas, dan anggota koperasi seharusnya mampu menjalankan fungsi sosial ekonomi yang ada didalam koperasi secara baik dan seimbang. Fungsi ekonomi koperasi bahwa pengurus harus bekerja berdasarkan motif ekonomi yang mencari keuntungan atau sisa hasil usaha karena sisa hasil usaha inilah yang akan dikembalikan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi tersebut, Sedangkan fungsi sosial koperasi yaitu adanya hubungan antara anggota dan pengurus yang demokratis, kesamaan derajat, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan proposional sesuai jasanya.

Kualitas sumber daya manusia di koperasi juga sangat berperan aktif untuk memotivasi anggota berpartisipasi dalam kegiatan usahanya karena anggota didalam koperasi adalah pemilik sekaligus juga pengguna jasa dan produk koperasi. Anggota yang berpartisipasi berarti memiliki keterlibatan terhadap koperasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada koperasi dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan koperasi

Partisipasi tersebut terlihat dari kemampuan anggota untuk melaksanakan dan pengendalian kegiatan perkoperasian melalui rapat anggota. Partisipasi

⁶http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=907:koperasi-didorong-bentuk-kemitraan-bisnis&catid=50:bind-berita&Itemid=97

didalam rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu keterlibatan para anggota, pengurus dan pengawas secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha, serta dalam menikmati sisa hasil usaha.

Pengendalian disini yaitu anggota mempunyai hak dan kewajiban melakukan pengawasan didalam kegiatan koperasi. Pengendalian yang dilakukan oleh anggota tidak boleh bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, karena merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung untuk meningkatkan kinerja koperasi.

Kurang memadainya mutu dan kualitas sumber daya manusia dan rendahnya kinerja koperasi berpengaruh terhadap kemampuan koperasi untuk memobilisasi dana investasi dalam pengembangan koperasi. Hal ini mengakibatkan tidak berkembangnya permodalan koperasi. Koperasi belum dapat melaksanakan mobilisasi dan pengelolaan dana bagi koperasi secara lebih aktif dan efisien. Padahal ini merupakan sumber untuk menumbuhkan kekuatan rill koperasi sehingga kinerja koperasi pun akan bertambah.

Sumber modal koperasi terdiri dari modal *intern* yaitu berupa dari simpanan-simpanan seperti simpanan wajib, pokok maupun sukarela dan cadangan dari hasil perolehan SHU yang berupa kekayaan perkoperasian. Modal ini dapat besar dan kecil nilainya berkaitan dengan besar atau kecilnya dukungan anggota koperasi dalam berkoperasi, tetapi pada kenyataannya masih relatif

rendah. Sedangkan modal *ekstern* dapat berasal dari : anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan, serta sumber lainnya yang sah.⁷

Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian modal tetap dan modal kerja yang dibutuhkan . Modal tetap diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan. Modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, asuransi dan sebagainya.

Pada tahun 2009-2010 jumlah modal sendiri koperasi di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp.28.348.727,78 (dalam jutaan) menjadi Rp.30.102.013,90 (dalam jutaan) sedangkan modal dari luar koperasi dari 31.503.882,17 (dalam jutaan) menjadi Rp. 34.686.712,67 (dalam jutaan).⁸ Pada tahun 2012 jumlah modal koperasi wilayah Dki Jakarta yaitu sebesar Rp. 1.469.548,00 terdiri dari Jakarta Pusat modal koperasi sebesar Rp. 416.822,00 (dalam jutaan), Jakarta Selatan modal koperasi sebesar Rp. 514.913,00 (dalam jutaan), Jakarta Barat modal koperasi sebesar Rp. 168.812,00, Jakarta Timur jumlah modal sebesar Rp. 250.765,00 (dalam jutaan) dan Jakarta Utara sebesar Rp. 118.234,00 (dalam jutaan).⁹ Pertumbuhan modal sendiri dari tahun ketahun dirasakan masih sangat kecil, hal ini di sebabkan adanya ketidak berhasilan koperasi yang akan berpengaruh terhadap kinerja koperasi. Hal ini terbukti jumlah

⁷ Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rheka cipta,2005)p.116

⁸ Kementrian Koperasi Dan UMKM, *Analisis Kinerja Koperasi*.

⁹ *Ibid.p5*

koperasi di Indonesia pada tahun 2009 sebesar 170.411 unit yang terdiri atas koperasi aktif sebesar 120.473 dan koperasi yang tidak aktif sebesar 49.938. Pada tahun 2010 jumlah koperasi di Indonesia sebesar 177.482, dimana koperasi aktif sebanyak 124.855 dan koperasi tidak aktif 52.627. Dari data tersebut terdapat kenaikan koperasi yang tidak aktif di Indonesia selama periode 2009-2010.¹⁰

Pada tahun 2012 wilayah Dki Jakarta yaitu Jakarta Pusat terdapat 1557 koperasi yang terdiri dari 1124 koperasi aktif dan 433 koperasi yang tidak aktif. Sedangkan wilayah Jakarta Selatan terdapat 2168 koperasi yang terdiri dari 1407 koperasi aktif dan 761 koperasi yang tidak aktif. Wilayah Jakarta Barat 895 koperasi yang terdiri dari 574 koperasi aktif dan 321 koperasi yang tidak aktif. Wilayah Jakarta Timur terdapat 1871 koperasi yang terdiri dari 1261 koperasi aktif dan 610 koperasi yang tidak aktif dan wilayah Jakarta Utara pada tahun 2012 terdapat 920 koperasi yang terdiri dari 188 koperasi aktif dan 734 koperasi tidak aktif.¹¹ Dari data tersebut koperasi di Jakarta Utara mempunyai koperasi yang tidak aktif paling banyak dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Sedangkan koperasi yang jumlah yang tidak aktif paling banyak di Jakarta Utara adalah koperasi karyawan swasta dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya. Koperasi karyawan swasta di wilayah Jakarta Utara berjumlah 322 koperasi, dimana dibagi menjadi 272 koperasi tidak aktif dan 50 koperasi yang aktif.¹²

Beberapa penjelasan diatas menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi seperti kualitas sumber daya manusia, pembinaan,

¹⁰ *Ibid*.p10

¹¹ Suku Dinas Koperasi dan UMKM Dki Jakarta, *Rekapitulasi Jumlah Koperasi Kota Administrasi Jakarta Utara*

¹² *Ibid*.p1

kemitraan dan modal. Dari sekian banyak faktor tersebut . modal koperasi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja koperasi karena suatu koperasi tidak disertai oleh modal yang cukup maka pengelolaan akan terhambat, sehingga akan menyebabkan penurunan kinerja pada koperasi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara modal koperasi dengan kinerja koperasi karyawan swasta di Jakarta Utara.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat ditemukan bahwa masalah –masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja koperasi?
2. Apakah terdapat hubungan antara pembinaan dengan kinerja koperasi?
3. Apakah terdapat hubungan antara kemitraan dengan kinerja koperasi?
4. Apakah terdapat hubungan antara modal koperasi dengan kinerja koperasi?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada dalam penelitian dan keterbatasan peneliti, maka permasalahan yang diambil dibatasi pada “ Hubungan antara modal koperasi dengan kinerja koperasi karyawan swasta di Jakarta Utara”.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, “Apakah terdapat hubungan antara modal koperasi dengan kinerja koperasi karyawan swasta di Jakarta Utara”.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, baik secara keilmuan maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu pengetahuan tentang hubungan modal dengan kinerja koperasi karyawan swasta di Jakarta Utara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan, serta referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap modal koperasi serta kaitannya terhadap kinerja koperasi karyawan swasta di Jakarta Utara.